

MONETISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT JAWA ABAD XIX

Indah Wahyu Puji Utami

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Abstrak: Tulisan ini menyoroti tentang monetisasi dan perubahan sosial ekonomi di Jawa selama abad XIX. Monetisasi meluas seiring dengan eksploitasi ekonomi kolonial dan ekonomi uang melalui sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal. Dampak monetisasi antara satu daerah dengan yang lain bisa berbeda, namun ada beberapa pola yang bisa ditarik seperti (1) monetisasi meningkatkan kebutuhan uang bagi orang Jawa, (2) monetisasi menghasilkan diferensiasi sosial baru, dan (3) hubungan patron klien yang memudar.

Kata-kata kunci: monetisasi, perubahan sosial ekonomi, diferensiasi sosial, patron-klien, masyarakat Jawa abad XIX

Abstract: This study concern about monetization and social economic change in Java during 19th century. Monetization embedded with the expansion of colonial exploitation and money economic through cultivation system and liberal economic system. The effect of monetization may differ from one region and another, but there are patterns such as (1) monetization has made Javanese people need of money increased, (2) it resulted new social differentiation, and (3) the patron-client relationship also faded.

Keywords: monetization, social economic changes, social differentiation, patron-client, 19th century Javanese people.

Abad XIX merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah kolonialisme di Hindia Belanda. VOC yang runtuh tepat sehari sebelum abad XIX meysisakan berbagai problem sosial ekonomi. Pada abad ini, Belanda juga sempat jatuh ke tangan penguasa Prancis yang menunjuk Herman Willem Deandels sebagai Gubernur Jendral di Hindia Belanda pada 1808. Namun kekuasaan Prancis juga tidak bertahan lama karena pada 1811 Inggris mengambil alih kekuasaan Prancis di Jawa dan menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur. Segera setelah Perang Napoleon berakhir di Eropa, Inggris dan Belanda menandatangani Konvensi London pada 13 Agustus 1815 yang menyepakati bahwa Inggris akan mengembalikan wilayah jajahan Belanda. Hal ini dilakukan agar Belanda bisa menjadi negara yang kuat dan

menjadi benteng bagi Inggris jika di kemudian hari Prancis menyerang kembali (Simbolon, 2006). Meskipun demikian, Hindia Belanda baru dikembalikan ke tangan Belanda pada 1816. Era baru kolonialisme Belanda di Hindia Belanda pun dimulai.

Setelah mendapatkan kembali wilayah jajahannya, Belanda menghadapi berbagai masalah ekonomi dan berupaya melakukan eksploitasi agar tanah jajahan dapat membantu keuangan di negeri induk. Berbagai usaha pun dilakukan, termasuk di antaranya dengan menerapkan *cultuurstelel* yang kontroversial itu. Ada berbagai pendapat di kalangan sejarawan mengenai dampak *cultuurstelsel*. Elson (1988:38-73) merangkum berbagai pendapat mengenai tanam paksa, antara lain Boeke yang menyebut sistem ini melahirkan ekonomi ganda (*dualistic economy*) yang merusak

tatanan masyarakat desa prakapitalis dan Geertz yang menuding *cultuurstelsel* menyebabkan involusi pertanian dan kemiskinan bersama di kalangan petani Jawa. Namun pendapat pesimistis itu ditentang oleh Elson yang menyebutkan bahwa *cultuurstelsel* di Pasuruan ternyata meningkatkan taraf hidup masyarakat. Marieke Bloombergen (2006:28) menyebutkan bahwa *cultuurstelsel* dari sudut pandang Belanda memang mampu meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh negeri induk yang menyumbang dana yang sangat besar yang mampu menyelamatkan keuangan Belanda. Melalui hasil *cultuurstelsel* ini Belanda mampu membangun berbagai proyek infrastruktur di Belanda tanpa harus menaikkan pajak di negeri induk. Namun *cultuurstelsel* harus berakhir pada 1870 dan digantikan dengan ekonomi liberal.

Baik *cultuurstelsel* maupun ekonomi liberal sebenarnya lebih banyak menguntungkan bagi pihak Belanda. Namun ada juga penduduk Bumiputra di Jawa yang diuntungkan dengan kedua sistem ini, sementara sebagian yang lain dirugikan. Oleh karenanya menarik untuk melihat dampak dari penerapan kedua kebijakan kolonial ini pada masyarakat Jawa, terutama dalam kaitannya dengan monetisasi. Monetisasi atau pengenalan nilai uang yang terjadi seiring dengan perluasan ekonomi uang merupakan tema yang menarik dalam sejarah sosial ekonomi di Jawa namun belum banyak dikaji. Pemerintah kolonial maupun perkebunan Eropa memperkenalkan ekonomi uang sehingga terjadi pergeseran sistem transaksi dan penghargaan jasa yang sebelumnya dengan barang berubah menjadi uang. Monetisasi meluas seiring dengan makin intensifnya ekspansi ekonomi kolonial abad XIX yang makin menggerus ekonomi barang di kalangan penduduk Jawa. Guna memahami menge-

nai monetisasi yang terjadi di Jawa pada abad XIX maka kita juga perlu memahami konteks ekonomi Hindia Belanda pada masa itu yang sangat terkait dengan kebijakan ekonomi di negeri induk. Selanjutnya dikaji pula bagaimana penerapan kebijakan tersebut di tanah jajahan dan pengaruhnya pada sosial ekonomi masyarakat Jawa yang tentu saja tidak seragam serta menunjukkan keunikan masing-masing daerah namun tetap dapat ditarik polanya.

MENATA EKONOMI HINDIA BELANDA

Kebijakan ekonomi Hindia Belanda pada abad XIX merupakan hasil dari perdebatan panjang di Belanda. Segera setelah Belanda mendapatkan kembali Hindia Belanda dari tangan Inggris, berbagai pihak di Belanda terlibat dalam serangkaian perdebatan mengenai kebijakan ekonomi yang akan diterapkan di koloni itu. Kaum liberal menginginkan ekonomi bebas diterapkan di Hindia Belanda, modal Barat harus didukung untuk berinvestasi dalam pertanian skala besar, rakyat harus bebas membeli dan menjual tanah, dan sistem kuno kepemilikan komunal harus dihapuskan (Vlekke, 2008:308). Sementara itu golongan konservatif berpendapat bahwa hal itu hanya akan merugikan rakyat Hindia Belanda karena mereka tak akan mampu bersaing dengan pengusaha Barat sehingga besar kemungkinannya mereka akan kehilangan tanah, bahkan terusir dari tanahnya sendiri.

Gubernur Jenderal Van der Capellen menyatakan bahwa apa yang nampaknya sangat liberal di Negeri Belanda berdampak sangat tidak liberal ketika dijalankan di Hindia Belanda dan hanya melindungi pemilik tanah Eropa sehingga ia menyatakan diri sebagai anti-liberal. Salah satu kebijakan Van der Capellen yang sangat

radikal adalah pembatalan hak sewa tanah pedesaan yang dikelola oleh asing pada 1821 dengan alasan para penyewa telah menggunakan tenaga rodi illegal. Kebijakan van der Capellen ini salah satunya karena kasus de Wilde. Andries de Wilde membeli tanah pertanian di Sukabumi dari Raffles dan mengembangkan penanaman kopi yang sukses. Van der Capellen mencurigai sukses ini sebagai hasil pemerasan terhadap penduduk. Selain itu hasilnya dijual kepada eksportir, terutama orang Amerika dan Inggris, semata-mata demi keuntungan de Wilde sendiri sehingga dianggap sebagai saingan yang tak wajar dan tak jujur bagi pemerintahan jajahan Belanda (Simbolon, 2006: 116-117).

Kebijakan pertanahan Van der Capellen tersebut tentu saja sangat merugikan para pengusaha asing. Kebijakan itu menyebabkan turunnya produksi tanaman ekspor yang dikelola oleh pengusaha perkebunan Eropa. Keuangan koloni mengalami defisit. Oleh karena itu ia dipanggil untuk kembali ke Belanda dan digantikan oleh Leonard Pierre Joseph Burggraaf du Bus de Gisignies (1826-1830).

Masa pemerintahan du Bus de Gisignies terlalu disibukkan dengan usaha menghadapi Perang Jawa dan kurang begitu memperhatikan masalah ekonomi. Sementara itu kondisi keuangan Negeri Belanda maupun koloninya di Hindia belanda semakin buruk.

Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch menyampaikan usulan pada raja Belanda (Raja Willem I) mengenai *cultuurstelsel*. Raja menyetujui usulan itu dan Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Du Bus pada Januari 1830 (Ricklefs, 2005:260). Gubernur Jenderal baru ini segera menerapkan *cultuurstelsel*. *Cultuurstelsel* terbukti berhasil menye-

lamatkan kondisi keuangan baik di Negeri Belanda maupun di Hindia Belanda.

Pada dasarnya *cultuurstelsel* merupakan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh Belanda pada koloninya terutama di Jawa. Eksploitasi atas tanah dan tenaga kerja untuk kepentingan tanaman ekspor pada prakteknya seringkali mengorbankan tanaman pangan. Tanah-tanah yang subur banyak digunakan untuk penanaman tanaman ekspor. Pengerahan tenaga kerja penduduk untuk kepentingan ini juga cukup besar, namun hal ini tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pengerahan penduduk seringkali dilakukan melalui kerja wajib yang memang ada dalam institusi tradisional sehingga para penduduk yang bekerja tidak perlu dibayar. Kerja wajib yang dikenakan pada para penduduk oleh para kepala-kepala atau bupati seringkali melampaui batas yang seharusnya. Pemerintah kolonial yang mengawasi para pejabat Bumiputra pun umumnya tak mengambil langkah yang tegas pada para pejabat Bumiputra yang melakukan penyelewengan. Hal itu kemudian dikritik oleh E. Douwes Dekker dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar yang terbit tahun 1860. Buku itu berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai asisten residen di Lebak, Banten pada 1856.

Sebenarnya jauh sebelum Max Havelaar sudah banyak kritik yang dilancarkan pada *cultuurstelsel*. Reaksi menentang *cultuurstelsel* yang mulai terjadi sekitar 1848 terungkap dalam sejumlah buku di mana sistem ini dan semua konsekuensinya dikutuk total (Vlekke, 2008:328), salah satunya adalah tulisan van Hoevel yang mengungkapkan bahwa sekitar 40 juta gulden pertahunnya yang mengalir ke negeri Belanda sementara penduduk di wilayah jajahan atau di Jawa tidak mampu memenuhi kebutuhannya

sendiri (Wahyudi, 2000: 49). Pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya sebuah konstitusi yang liberal memberikan kepada parlemen Belanda (*States-General*) peranan yang berpengaruh dalam urusan-urusan penjajahan (Ricklefs, 2005:268). Kaum oposisi bersatu mendesak diadakannya perubahan yang lebih liberal. Perubahan yang lebih liberal di sini maksudnya antara lain adalah pengurangan peranan pemerintah dalam negara jajahan, pembebasan dan pembatasan-pembatasan atas usaha swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan penindasan terhadap masyarakat di Jawa.

Pertentangan kelompok liberal dengan kelompok konservatif makin tajam dengan terbitnya buku karya Eduard Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli, yang berjudul *Max Havelaar* pada tahun 1860. Buku ini mengungkapkan dengan keadaan pemerintah kolonial yang lalim dan korup di Jawa (Ricklefs, 2005:268). Buku Max Havelaar, lebih daripada sekedar kritik terhadap pemerintahan kolonial dalam bentuk sastra, juga merupakan satire tanpa simpati terhadap suatu jenis borjuasi Belanda, yang saleh dan bahkan moralistik di antara sesama mereka, tapi merogoh setiap sen yang bisa mereka peras dari Hindia Belanda, sambil seenaknya mengabaikan kondisi parah penduduk Hindia Belanda yang memeras keringat untuk memproduksi kekayaan itu (Vlekke, 2008:342).

Pada tahun 1863, kabinet Belanda dibentuk oleh pemimpin besar kaum liberal, Thorbecke. Thorbecke mengangkat Isaac Fransen van de Putte sebagai Menteri Koloni. Van de Putte mengusulkan untuk menghapuskan semua usaha pertanian pemerintah kecuali gula dan kopi, untuk menghentikan semua monopoli, dan untuk memperkenalkan suatu kebijakan perniagaan yang baru yang didasarkan pada perdagangan bebas. Usulannya tersebut

diterima (Simbolon, 2006). Van de Putte juga mencoba kemungkinan baru untuk usaha pertanian swasta dengan hukum yang mengatur kondisi di mana tanah dan tenaga kerja bisa tersedia untuk usaha-usaha ini. Usulan ini ditolak kaum konservatif. Namun gerakan-gerakan dan tuntutan ke arah reformasi lebih kuat yang akhirnya melahirkan *Agrarische Wet* (Undang-undang Agraria) 1870 pada saat de Waal menjabat sebagai Menteri Koloni.

PROGRAM LIBERAL DAN MENJAMURNYA PERUSAHAAN SWASTA EROPA

Program ekonomi liberal secara resmi baru dimulai pada 1870 dengan keluarnya *Agrarische Wet* (UU Agraria) yang membuka peluang lebih besar bagi pengusaha swasta Eropa untuk melakukan usaha di Hindia Belanda dengan prinsip liberal. Meskipun demikian bukan berarti pengusaha swasta Eropa belum berperan sebelumnya. Di beberapa daerah di Jawa perkebunan swasta bisa menguasai sampai 76% tanah yang ditanami sedangkan perkebunan pemerintah tidak ada sama sekali. Luas tanah yang dikuasai perkebunan swasta dan pemerintah untuk seluruh Jawa berbanding 97:3 (Simbolon, 2006:154). Hal ini dimungkinkan karena pengusaha swasta Eropa boleh menyewa tanah terlantar (*woeste gronden*).

Pasal 62 RR 1854 menjamin kebebasan memperoleh tanah dan tenaga kerja di Hindia Belanda, namun UU pelaksanaannya belum ada. Sebelum adanya UU pelaksana ini kesempatan para pemodal swasta bergantung pada prakarsa pribadi gubernur jendral, misalnya seperti yang dilakukan Gubernur Jendral Duymaer van Twist (1851-1856) dan Gubernur Jendral Pahud (1856-1861). Tanah, yang resmi dianggap milik pemerintah dan yang disebut tanah terlantar (*woeste gronden*),

boleh disewakan. Bumiputra masih dilarang menyewakan (Simbolon, 2006:153-155).

Tabel 1. Luas Pertanian Pemerintah dan Perkebunan Swasta di Jawa

Tahun	Pertanian Pemerintah (hektar)	Penduduk	Perkebunan Swasta (hektar)	Penduduk
1845	32.899	792.303	1.225.722	292.163
1851	32.088	786.486	1.127.714	775.060
1860	30.635	758.746	1.176.865	1.208.865

Sumber: Simbolon (2006:507)

Aliran modal yang masuk ke Hindia Belanda makin deras dengan diberlakukannya UU Agraria 1870. UU Agraria 1870 mengakui sistem hak milik Bumiputra atas tanah (Hak Bumiputra atas tanah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu hak ulayat (*beschikkingsrecht*) atas tanah dan air; hak istimewa perorangan atas tanah tertentu yang diberi garis batas berdasarkan pilihan orang itu (*vookeursrecht*); dan hak memungut hasil olahan sendiri dari tanah milik bersama (Simbolon, 2006:158) melarang pengalihan hak Bumiputra atas tanah kepada orang asing tetapi memperbolehkan penyewaan selama 5-20 tahun; memberikan kebebasan bagi pemodal swasta untuk menyewa tanah dan tenaga kerja; semua tanah yang tidak merupakan hak milik Bumiputra dikuasai pemerintah dan dapat disewakan sampai 75 tahun (Simbolon, 2006:148). Konsekuensi dari kebijakan baru ini adalah penghentian *cultuurstelsel* secara bertahap yang pada masa sebelumnya merupakan sumber penghasilan yang penting bagi pemerintahan kolonial maupun bagi negeri Belanda sendiri.

UU Agraria hanya memuat ketentuan umum mengenai sistem agraria di Hindia Belanda. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem agraria yang baru ini dimuat dalam *Agrarische Besluit* yang

dikeluarkan pada tahun yang sama. *Agrarische Besluit* memuat mengenai *domeinsverklaring* yang menyebutkan bahwa “seluruh tanah yang petuntutannya tidak ditentukan oleh hukum pemilikan lain, merupakan milik negara” (*Alle grond waarop niet door andere recht van eigendom bewezen is, is domein van de staat*) (Simbolon, 2006:160). Dengan demikian pemerintah kolonial dapat mengklaim seluruh tanah yang hak kepemilikannya tidak jelas sebagai milik negara.

Domeinsverklaring merupakan ketentuan yang mendasar dalam pelaksanaan UU Agraria, yaitu hak negara atas tanah di Hindia Belanda baru ada setelah hak Bumiputra terjamin. Selanjutnya negara berhak menyewakan tanah miliknya itu untuk jangka panjang (*erfpacht*) tidak lebih dari 75 tahun. Pemerintah juga harus mengusahakan agar tidak ada pemindahan hak atas tanah yang sampai mengganggu hak Bumiputra atas tanah milik mereka. Bumiputra juga diberi kesempatan untuk memperoleh hak milik baru atas tanah (*agrarische eigendomsrecht*).

Program ekonomi liberal di Hindia Belanda juga ditandai dengan keluarnya *Suiker Wet* (UU Gula) pada 1870 yang mengakiri produksi gula secara paksa oleh pemerintah. Lambat laun tanah dan pertanian untuk tebu akan diserahkan pada swasta. Dampak yang paling menonjoldari

UU Agraria dan UU Gula 1870 adalah menjamurnya perusahaan-perusahaan swasta Eropa. Perusahaan-perusahaan ini dihadapkan pada dua pilihan tanah yang dapat disewa, tanah milik Bumiputra dan tanah milik negara. Umumnya perusahaan swasta lebih suka menyewa tanah milik negara karena mereka tak harus berurusan dengan rumitnya aturan sewa tanah dengan penduduk Bumiputra. Lagi pula tanah itu bisa dikontrak selama 75 tahun, sementara penyewaan tanah penduduk Bumiputra hanya dibatasi selama maksimal 20 tahun. Tanah ini juga dapat digunakan untuk tanaman yang memerlukan lahan luas dalam budidayanya dan dapat digunakan untuk budidaya tanaman menahun. Semua hal tersebut akan sulit dilakukan jika menyewa tanah penduduk Bumiputra. Penyewaan tanah penduduk terpaksa dilakukan jika tanaman yang diusahakan adalah tanaman sawah yang memerlukan perubahan tanah, atau paling tidak rotasi tanaman, seperti misalnya tebu (Boeke, 1942:78).

Peningkatan jumlah perusahaan swasta Eropa di Jawa juga didukung oleh faktor lain seperti pembukaan terusan Suez pada 1869 dan kemajuan teknologi perkapalan. Pada 1870 berdirilah maskapai kapal Belanda yang pertama menggunakan mesin uap, *de Stroomvaart Maatschappij Nederland*. Pada 1887 perkembangan teknologi perkapalan memungkinkan lalu lintas pos mingguan dilakukan antara Belanda dengan Hindia Belanda. Jika kapal layar lama hanya berbobot mati 2.500 ton (56 penumpang) dengan kecepatan 10 knot, maka kapal uap baru itu meningkat menjadi 5.000 ton (100 penumpang) dengan kecepatan 13 knot. Sejak 1900, tonase kapal bisa antara 5.000 sampai 200.000 ton (700 penumpang) dengan kecepatan 21 knot. Dengan demikian arus barang dan manusia menjadi semakin cepat dan mudah. Jika sebelumnya pelayaran

antara Hindia Belanda dengan negeri Belanda menggunakan kapal layar bisa memakan waktu 3 bulan atau paling cepat 40 hari, maka pelayaran dengan kapal uap hanya memakan waktu seminggu atau paling lambat 17 hari (Simbolon, 2006:159).

MONETISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI

Monetisasi di seluruh Jawa tidak berlangsung secara bersamaan. Monetisasi di daerah-daerah partikelir sudah berlangsung sebelum masa *cultuurstelsel* melalui komersialisasi tenaga kerja atau penjualan komoditas ekspor secara kecil-kecilan oleh penduduk. Namun monetisasi di sebagian besar Jawa baru terjadi pada abad XIX baik melalui *cultuurstelsel* maupun perkebunan swasta Eropa.

Penjualan kelebihan komoditas ekspor pada pemerintah kolonial selama penerapan *cultuurstelsel* memungkinkan penduduk untuk memperoleh uang meskipun sedikit. Selain itu pada masa ini arus barang impor mulai masuk ke pedalangan sehingga meningkatkan keinginan untuk memiliki barang-barang impor yang dianggap penting. Dengan demikian arus uang yang keluar dari desa juga meningkat. Oleh karenanya penduduk mau tidak mau harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan uang (Boeke, 1942:67). *Cultuurstelsel* juga mengajarkan pada penduduk Bumiputra untuk menghasilkan uang melalui penyediaan jasa pada perkebunan maupun pabrik-pabrik.

Peningkatan monetisasi juga terjadi melalui pertumbuhan perkebunan swasta Eropa, baik pada masa *cultuurstelsel* dan terutama pada masa ekonomi liberal. Pembukaan perkebunan swasta Eropa memerlukan tanah dari

penduduk dan terutama tenaga kerja. Sebelum program ekonomi liberal diberlakukan, penyewaan yang berlaku adalah penyewaan tanah sekaligus tenaga kerja, kecuali perusahaan yang menggunakan *woeste gronden* yang memang menerapkan kontrak tenaga kerja individual. Namun setelah 1870 terjadi liberalisasi sekaligus komersialisasi tanah dan tenaga kerja, kontrak atas tanah penduduk dan kontrak tenaga kerja dilakukan secara terpisah. Monetisasi yang berlangsung melalui penetrasi ekonomi Barat telah menimbulkan perubahan dalam struktur sosial ekonomi masyarakat Jawa, meskipun perubahan yang ditimbulkan berbeda-beda di tiap daerah.

Ekonomi ekspor menarik penduduk Bumiputra baik secara paksa maupun sukarela ke dalamnya sehingga penduduk berkesempatan memperoleh uang. Selain itu pengejaran penghasilan berupa uang yang membawa mereka makin larut dalam ekonomi uang yang sebelumnya asing bagi mereka. Meningkatnya kebutuhan uang seringkali membuat penduduk Bumiputra terpaksa menggadaikan atau menjual tanahnya sehingga terjadi konsentrasi pemilikan tanah pada penduduk Bumiputra yang kaya.

Komersialisasi dan liberalisasi tenaga kerja melalui sistem buruh upahan juga mulai mengikis hubungan patron-klien di daerah perkebunan dan sekitar pabrik. Kesetiaan penduduk pada elite tradisional Bumiputra lambat laun beralih pada perusahaan-perusahaan swasta yang mengupah mereka. Kekuasaan dan wibawa elite tradisional Bumiputra semakin menurun di mata penduduk, sementara elite desa tumbuh menjadi kelas yang makin kaya dan kuat.

Monetisasi, seperti telah disinggung sebelumnya, tidak berlang-

sung secara seragam dan bersamaan di seluruh Jawa, begitu pula perubahan sosial yang dihasilkan. Guna memahami lebih lanjut mengenai monetisasi dan perubahan sosial di Jawa abad XIX, berikut ini disajikan beberapa contoh.

Kopi, Monetisasi, dan Perubahan Sosial Ekonomi di Cirebon

Salah satu contoh yang menarik dari monetisasi dan perubahan struktur so-sial ekonomi pada abad XIX terjadi di Cirebon. Monetisasi mulai meluas di Cirebon sejak kebijakan pembudidayaan bebas yang dikeluarkan tahun 1823. Di bawah sistem ini penduduk desa menanam serta mengolah kopi, sementara para kepala desa mempertanggungjawabkan segi keuangannya. Para kepala desa diharuskan menyerahkan sebagian (biasanya $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ bagian) dari hasil produksi mereka pada pemerintah, atau membayar uang senilai dengan bagian yang seharusnya dibayarkan tersebut. Dengan demikian penduduk bisa menjual kelebihan produksi mereka kepada pedagang swasta.

Sistem baru ini tidak melibatkan para bupati dalam budidaya kopi sama sekali. Peranan yang lebih besar justru diberikan kepada para kepala desa sehingga mereka menggunakan kekuasaan dan kekayaan barunya untuk memantapkan kedudukan mereka pada puncak piramida sosial di desa. Para kepala desa ini memiliki wewenang untuk membagi-bagikan kebun-kebun kopi pada anggota-anggota terkemuka golongan *sikep* (penduduk yang sepenuhnya berhak atas tanah garapan). Para *sikep* bertanggung jawab atas penanaman dan pemeliharaan tanaman kopi, tapi bukan mereka sendiri yang mengerjakannya, melainkan para *wuwung* (Petani bukan pemilik tanah yang telah beristri) dan *bujang* (petani bukan

pemilik tanah dan belum beristri) yang mencari nafkah sebagai penyewa serta buruh tani (Fernando dan O'Malley, 1988:242-243).

Penyerahan supervisi kepada para elite desa dan pembagian uang dari atas ke bawah makin memantapkan peran para elite desa, sementara para bupati semakin dijauhkan dari kegiatan ekonomi yang penting. Para *wuwung* dan *bujang* yang bekerja keras di kebun-kebun kopi mendapatkan bagian uang yang paling sedikit dari sistem ini.

Kopi mulai masuk dalam *cultuurstelsel* sejak 1832. Masuknya kopi dalam sistem baru ini makin memantapkan kedudukan para elite desa di Cirebon dan mengembalikan keterlibatan bupati dalam budidaya kopi. Para elite berusaha meningkatkan produksi kopi di wilayahnya demi mengejar premi yang akan diberikan pada mereka jika bisa memenuhi atau bahkan melebihi target. Sementara itu para petani biasa hanya menerima sedikit bagian dari penjualan kopi. Mereka inilah yang harus membuka lahan, melakukan pembibitan, penanaman, perawatan hingga panen. Hasil panen ini kemudian dijual senilai f. 25 sepikul (1 pikul setara dengan 62 kg). Dua perlima dari f. 25 dipotong sebagai sewa tanah, f. 3 lagi dipotong untuk biaya pengangkutan dan hanya f. 12 yang tersisa dari penjualan tiap pikulnya.

Para *sikep* dan elite desa adalah golongan yang paling beruntung secara ekonomi. Mereka bertugas mengendalikan pembayaran kopi yang disetor ke gudang-gudang pemerintah sehingga merekalah yang membagikan uang pada orang-orang yang melakukan pekerjaan berat yang sesungguhnya dalam budidaya kopi. Beberapa di antara para *sikep* ini kemudian diangkat menjadi pengawas resmi kebun kopi sehingga penghasilannya makin besar.

Prestise sosial para *sikep* dan elite desa makin meningkat pada masa ini. Mereka mulai melakukan hubungan yang lebih intensif dengan pejabat-pejabat Bumiputra di atas tingkat desa dan menjalin hubungan baik dengan golongan Tionghoa. Keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan seringkali mereka gunakan untuk pergi haji sehingga sepulangnya mereka menyanjung gelar 'haji' dan semakin meneguhkan kedudukan sosial mereka yang tinggi dan semakin menjauh dari masyarakat desa lapisan bawah (Fernando dan O'Malley, 1988:252).

Menjelang tahun 1870 mulai terjadi penurunan hasil perkebunan kopi karena usia tanaman kopi yang sudah tua sehingga kurang produktif. Para petani umumnya enggan untuk memotong pohon kopi dan menggantinya dengan tanaman kopi yang baru karena memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jika mereka memotong tanaman yang sudah tua, mereka harus membakarnya lalu menyebarkan abunya ke tanah dan membiarkan tanah itu beristirahat untuk beberapa lama sebelum siap untuk diolah menjadi kebun kopi baru lagi.

Budidaya kopi makin terpuruk dengan berjangkitnya hama *Hemalia vestarix* pada 1879 yang baru berakhir pada pertengahan 1880-an. Produksi kopi Cirebon yang pada akhir 1870-an rata-rata berjumlah 28.400 pikul setahun merosot hingga 9.000 pikul pertahun pada akhir 1880-an. Pada 1889 hanya sekitar 14.000 rumah tangga saja yang masih berkecimpung dalam produksi kopi. Jumlah ini kurang dari seperempat dari jumlah keluarga yang terlibat dalam budidaya kopi beberapa tahun sebelumnya (Fernando dan O'Malley, 1988:255-256).

Gula, Monetisasi, dan Perubahan Sosial Ekonomi di Pekalongan

Gula merupakan komoditas penting abad XIX selain kopi, indigo, tembakau dan teh. Industri gula, seperti halnya kopi, juga menyeret penduduk pada monetisasi. Monetisasi dan perubahan struktur sosial ekonomi yang diakibatkan oleh industri misalnya terjadi di Karesidenan Pekalongan.

Industri gula berskala kecil sudah ada sebelum masa *cultuurstelsel*. Industri ini umumnya dijalankan oleh para pengusaha Tionghoa. Namun semenjak 1830 terjadi perubahan dalam industri gula, meskipun di Karesidenan Pekalongan perubahan ini berjalan lambat. Produksi di pabrik gula Wonopringgo dimulai dengan buruk sekali, yang ditandai dengan rendahnya produktivitas dan sikap tidak peduli yang ditunjukkan oleh petani dan priyayi terhadap serbuan baru ke wilayah pedesaan (Knight, 1988:80).

Cultuurstelsel sangat bergantung pada peranan para elite birokrasi tradisional. Dalam kasus karesidenan Pekalongan pada awalnya para elite birokrasi tradisional ini bersikap acuh terhadap sistem baru ini. Perubahan sikap ini baru terjadi setelah pergantian bupati Pekalongan dan bupati Batang pada 1847 dan 1848. Para elite birokrasi tradisional yang baru bersikap lebih kooperatif pada sistem yang baru dan pada pabrik gula.

Elite desa nampaknya merupakan golongan yang paling diuntungkan dalam budidaya tebu dan industri gula. Para elite desa mengemban tugas-tugas pengawasan di perkebunan dan menjadi perantara maupun semacam pengusaha. Pada 1850-an terjadi 'perdagangan kuli secara besar-besaran' oleh kepala-kepala

yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga suka-rela bagi pabrik pada musim panen dan penggilingan, juga mencairkan tenaga pengganti dengan pembayaran tertentu bagi petani pemilik tanah yang tidak bersedia melakukan kerja sukarela sendiri (Knight, 1988:84). Dalam hal ini para elite desa memegang peranan penting dalam komersialisasi tenaga kerja untuk kepentingan industri gula.

Keuntungan yang didapat dari industri gula juga melahirkan elite-elite baru di desa yang berasal dari petani kaya atau para 'pengusaha desa'. Para pengusaha desa ini memperoleh keuntungan dari bisnis penyewaan hewan pembajak kepada petani penanam yang tidak memilikinya. Selain itu para pengusaha ini juga mengumpulkan kekayaan melalui kontrak pengangkutan tebu. Peningkatan jumlah elite desa dapat dilihat pula pada peningkatan jumlah jemaah haji di Karesidenan Pekalongan. Pada awal 1860-an hanya sekitar 240 jemaah sementara pada tahun 1868 jumlahnya meningkat menjadi 863 jemaah.

Upah menanam (*plantloon*) merupakan salah satu perangsang bagi penanaman tebu oleh para petani. Penerimaan kotor upah penanaman terus naik sejak 1854 dan bahkan melebihi sewa tanah yang harus dibayar para petani pada pihak Karesidenan. Arus uang yang masuk ke pedesaan mengalami peningkatan, namun arus uang yang keluar juga meningkat. Banyak petani yang bergantung penghasilan mereka dari industri gula untuk membeli bahan pakaian dan beras yang didatangkan dari wilayah lain.

Tabel 2. Upah Menanam dan Sewa Tanah di Wonopringgo

Tahun	Jumlah Keluarga Penanam	Jumlah Upah Menanam	Upah Menanam per Keluarga	Sewa Tanah yang Dibayarkan oleh Penduduk Kring
1836	2.554	22.880	8,99	12.260
1840	2.253	49.351	21,91	15.985
1841	2.252	24.775	11,00	17.334
1848	3.662	51.590	14,09	-
1849	3.265	29.535	9,05	28.254
1852	2.464	25.936	9,80	28.000
1854	2.908	62.329	21,43	-
1855	2.754	68.310	24,80	25.671
1856	2.975	71.101	23,90	-
1857	3.099	78.249	25,25	26.681
1860	4.261	80.826	18,97	15.991
1862	4.257	80.742	18,97	14.447
1861	3.918	75.404	19,25	18.226
1863	3.918	88.609	22,62	27.592
1864	4.398	88.631	20,15	20.640
1865	4.478	91.925	20,53	35.775
1866	4.590	91.920	20,03	-

Sumber: Knight (1988:89)

Peningkatan upah penanaman yang bahkan lebih besar dari sewa tanah yang harus dibayarkan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai peningkatan kesejahteraan bagi para petani pemilik lahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, pembayaran sewa tanah itu merupakan pembayaran komunal desa dan kepala desa serta para priyayi merupakan tenaga penagih sewa tersebut. Hal ini membuka peluang bagi para penagih untuk melakukan penyelewengan dengan menarik jumlah yang lebih besar pada penduduk melebihi yang seharusnya. Kedua, adanya 'biaya siluman' yang tidak sedikit, yang berhubungan dengan kebutuhan mereka untuk menyediakan secara gratis tenaga kerja di luar diri mereka bagi industri gula dengan hewan pembajak dan bahan pembuat pagar. Para pemilik tanah harus menyediakan biaya untuk upah tenaga kerja pengganti dan biaya sewa hewan pembajak karena tidak semua pemilik tanah memilikinya. Jumlah pengeluaran untuk upah dan sewa hewan pembajak ini bisa mencapai 10% dari upah

menanam yang mereka terima dalam setahun. Pembuatan pagar untuk mencegah kerusakan oleh hewan ternak dan babi hutan menyerap sekitar 5-10% dari upah menanam yang diterima tiap tahun. Jadi, bila dikalkulasikan secara sederhana 'biaya siluman' dapat menyerap sekitar 15-20% dari upah menanam yang diterima oleh petani pemilik lahan (Knight, 1988: 90-92).

Peningkatan arus uang yang masuk ke desa juga disebabkan oleh komersialisasi tenaga kerja. Meskipun mekanisme telah terjadi dalam industri gula abad XIX, namun industri ini masih memerlukan banyak tenaga kerja karena mekanisme itu hanya ada di dalam pabrik (Knight, 1993:70). Industri gula memerlukan banyak tenaga kerja mulai dari proses penanaman, perawatan tanaman, panen, pengangkutan ke pabrik hingga pemrosesan tebu menjadi gula. Dalam rangkaian proses panjang itu industri gula banyak bergantung pada tenaga manusia. Tenaga kerja penduduk desa yang dikerahkan dalam industri gula terbagi dalam

tiga kelompok, yaitu (a) pekerja regular (para tukang dan mandor), (b) pekerja musiman (pengawas pabrik, kuli pabrik, pengawas kebun, asisten pengawas kebun, kuli angkut), dan (c) sejumlah besar buruh pekerja lapangan. Kelompok (a) bekerja sepanjang tahun, kelompok (b) merupakan pekerja musiman tetap. Kelompok (a) dan (b) dibayar berdasarkan waktu mereka melakukan pekerjaan. Kelompok (c) dibayar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu (Boeke, 1942:85).

Masifikasi industri gula di Pekalongan berakibat makin larutnya penduduk Bumiputra dalam ekonomi uang dan perubahan sosial ekonomi. Industri gula, baik pada masa *cultuurstelsel* maupun masa liberal, memberikan kekuasaan dan kekayaan yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya pada para kepala desa. Selain itu juga memberi peluang bagi timbulnya elite baru di desa yang terdiri dari para petani kaya yang menjadi semacam ‘pengusaha’ di desa. Banyak di antara elite baru ini yang kemudian menunaikan ibadah haji dan sepulangnya mereka menyandang gelar ‘haji’ yang makin mengukuhkan kedudukan mereka yang tinggi dan berbeda dari penduduk desa kebanyakan.

Sektor Non-Agraris, Monetisasi, dan Perubahan Sosial Ekonomi

Sektor non-agraris relatif kurang mendapatkan perhatian dalam kajian sejarah sosial ekonomi, padahal sektor ini adalah bagian integral dari masyarakat desa di Jawa. Sekitar 23% dari penduduk terlibat dalam sektor non-agraris ini yang meliputi kegiatan manufaktur, perdagangan dan jasa. Monetisasi juga terjadi pada sektor non-agraris yang pada akhirnya menimbulkan perubahan sosial ekonomi masyarakat.

Sektor manufaktur terdiri dari para tukang dan tenaga kerja dengan keahlian tertentu yang memproduksi berbagai barang untuk kebutuhan domestik dan

menawarkan jasa mereka pada populasi pedesaan. Sektor ini tidaklah besar dan hanya mempekerjakan sekitar 4% dari populasi tenaga kerja. Sektor perdagangan lebih besar dari sektor manufaktur. Sekitar 11% dari populasi tenaga kerja terlibat dalam sektor ini. Sementara itu sektor jasa hanya melibatkan sekitar 4% dari populasi tenaga kerja. Sektor ini terdiri dari para buruh upahan yang bekerja di luar sektor agraris, pelayan rumah tangga dan buruh transportasi.

Pertumbuhan pesat tenaga kerja ahli terjadi setelah 1830. Pertumbuhan ini terutama pada sektor pertukangan kayu. Para tukang kayu inilah yang membuat kereta-kereta yang digunakan untuk alat pengangkutan barang. Industri gula dan indigo juga memerlukan tenaga dan keahlian para tukang kayu ini. Selain itu ada pula tukang kayu yang bekerja pada bengkel *furniture* dan galangan kapal (Fernando, 1993:92-93).

Perkembangan ekonomi dan perluasan perkebunan memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit seperti pabrik, jalan, dan jembatan. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi tersebut memerlukan banyak tukang bangunan sehingga jumlah mereka juga mengalami kenaikan sejak 1830. Pada awalnya tidak banyak tukang bangunan yang tersedia pada awal abad XIX, namun karena tingginya permintaan akan tenaga tukang bangunan maka seringkali orang yang tidak cukup ahli ikut bekerja pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Banyak di antara mereka ini yang kemudian meneruskan pekerjaan sebagai tukang bangunan.

Jumlah pandai besi juga mengalami peningkatan sejak 1830. Mereka memproduksi alat-alat pertanian, bagian-bagian tertentu dari kereta, dan juga menyediakan jasa perbaikan alat-alat tersebut. Beberapa di antara mereka juga bekerja

pada pembuatan kapal. Pada awal 1830-an terdapat sekitar 870 pandai besi di sembilan karesidenan di Jawa.

Produksi tembikar berubah dari pekerjaan paruh waktu menjadi pekerjaan penuh waktu setelah 1830. Pada dua dekade berikutnya industri tembikar berkembang menjadi industri besar di beberapa area. Batu bata dan genting tembikar merupakan produk yang banyak dibutuhkan terkait dengan perkembangan ekonomi saat itu.

Perdagangan merupakan salah satu sektor non-agraris yang penting. Sebagian besar dari Bumiputra yang terlibat dalam sektor perdagangan adalah pemilik warung dan pedagang keliling, namun beberapa di antara mereka, terutama di antara para haji, menjalankan bisnis pada skala yang lebih besar. Peningkatan jumlah pasar dan perdagangan pedesaan adalah indikator pertumbuhan aktivitas perdagangan secara cepat (Fernando, 1993:94). Pembangunan jaringan jalan sebagai akibat dari perkembangan ekonomi di awal abad XIX juga turut berpengaruh pada peningkatan perdagangan. Jaringan jalan yang makin baik memudahkan para pedagang untuk bepergian dari satu daerah ke daerah lain baik untuk menjajakan barang dagangannya maupun untuk membeli barang yang akan diperdagangkan.

Perkembangan ekonomi sejak 1830 telah mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan di luar sektor agraris. Penyediaan keahlian tertentu, jasa maupun perdagangan menarik penduduk Jawa pada sistem ekonomi uang. Monetisasi yang terjadi pada sektor ini juga mengakibatkan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Sebagian besar petani yang tidak memiliki tanah akhirnya lari ke sektor non-agraris seperti manufaktur dan jasa yang sedang mengalami pertumbuhan pada abad XIX.

PENUTUP

Kebijakan ekonomi yang diterapkan di Hindia Belanda pada awal abad XIX merupakan hasil perdebatan panjang kaum konservatif dan liberal di negeri Belanda. Pada awalnya kaum konservatif yang menang melalui penerapan *cultuurstelsel* yang terbukti mampu mengatasi masalah keuangan saat itu. Namun pada sisi lain golongan liberal, baik didorong oleh motif ekonomi maupun kemanusiaan, terus memperjuangkan liberalisasi di Hindia Belanda melalui kritik yang mereka lancarkan terhadap *cultuurstelsel* maupun dengan memaksa masuk dan mendirikan usaha di Hindia Belanda. UU Agraria dan UU Gula 1870 adalah tonggak kemenangan kaum liberal yang membuka kesempatan yang lebih luas bagi para pengusaha swasta Eropa untuk berusaha di Hindia Belanda.

Monetisasi meluas di Hindia Belanda sejak sekitar perempat kedua abad XIX, baik melalui *cultuurstelsel* maupun perkebunan swasta Eropa. Masyarakat Jawa mau tak mau ditarik dalam ekonomi ekspor. Perubahan sosial ekonomi pun tak terhindarkan. Contoh di Cirebon dan Pekalongan menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan pada abad XIX memberikan peluang bagi elite desa untuk tumbuh menjadi suatu golongan yang kaya dan makin kuat. Sementara itu para petani kebanyakan hanya mendapat bagian paling sedikit dari perkembangan ekonomi saat itu.

Monetisasi juga melahirkan diferensiasi sosial yang makin kompleks pada masyarakat Jawa abad XIX. Liberalisasi dan komersialisasi tenaga kerja melahirkan golongan pekerja bebas atau pekerja upahan pada periode ini. Begitu pula dengan golongan tuna kisma (petani tak bertanah) yang lahir akibat penetrasi

ekonomi Eropa yang begitu intensif pada daerah pedesaan.

Hubungan patron klien juga mulai memudar. Hubungan yang dulunya bersifat sangat personal bergeser menjadi hubungan yang impersonal karena orang-orang yang dulunya menjadi klien memerlukan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kondisi ekonomi yang sedang berubah. Jika mereka bekerja pada orang lain, termasuk pada orang yang dulu menjadi patronnya, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan upahan.

Masifikasi dan industrialisasi sektor agraris abad XIX juga mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar sektor agraris. Industrialisasi dan perkembangan ekonomi saat itu menuntut adanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang menarik sejumlah besar tenaga kerja. Perkembangan ekonomi juga mendorong para petani tak bertanah (tuna kisma) untuk bekerja di luar sektor agraris. Selain itu perdagangan juga mengalami peningkatan pada abad XIX.

DAFTAR RUJUKAN

- Boeke, J.H. 1942. *The Structure of Netherlands Indian Economy*. New York: Institute of Pacific Relations
- Elson, R.E. *Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa*, dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (Ed.). 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Fernando, M.R. dan Willan J. O'Malley, "Petani dan Pembudidayaan Kopi di Karesidenan Cirebon 1800 – 1900," dalam Anne Booth (Ed.) 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Fernando, M.R., "Growth of Non-Agricultural Indigenous Economic Activities in Java 1820-1880", dalam J. Thomas Linblad (Ed), *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*, (Leiden: Programme of Indonesian Studies, 1993), hlm.92-93.
- Knight, G.R. *Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad Ke-19: Studi Kasus Karesidenan Pekalongan 1830-1870*, dalam Anne Booth (Ed). 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta:LP3ES
- _____, *Gully Coolies, Weed Woman and Snijvolk: The Sugar Industry Workers of North Java in the Early Twentieth Century*, dalam J. Thomas Linblad (Ed). 1993. *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesian Studies
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi
- Simbolon, P. T. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Vlekke, B.H.M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG
- Wahyudi, S.S., 2000. *Dampak Agro Industri di Daerah Persawahan di Jawa*. Semarang: Mimbar